

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah dunia seakan-akan menjadi kampung dunia (*global village*). Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, dapat pula mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Dunia sudah dirasakan ibarat sebuah dusun global (*global village*). Batas-batas geografis maupun Negara sudah tidak lagi penting (*significant*). Artinya Negara-negara itu harus berkompromi dengan logika ekonomi yang tidak mengenal batas Negara. Dengan kata lain kita masih memiliki banyak sistem politik tetapi hanya satu sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi dunia. Konsep satu ekonomi nampaknya telah mendorong munculnya satu identitas global.

Fenomena globalisasi telah menantang kekuatan penerapan unsur-unsur karakter bangsa. Kenichi Ohmae dalam bukunya yang berjudul *Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy* (1999) dan *The End of Nation State: The Rise of Regional Economies* (1996) mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, dan industri yang membentuk peradaban modern.

Persoalan globalisasi memiliki dua mata pisau yang amat tajam, untuk kita semua yang mesti diwaspadai. Globalisasi bukan berarti bebas nilai; baik-buruk, benar-salah, pantas-tidak pantas pasti ada dalam tatanan nilai masing-masing orang, keluarga, organisasi, masyarakat, dan negara. Sehingga sekalipun bebas berinteraksi antar sesama di seluruh dunia, tetapi dia memiliki ciri khas masing-

masing, karakter yang dapat membedakan antara satu orang dengan orang lain, antara keluarga satu dengan yang lain, begitu juga antara karakter warga negara satu dengan negara lain. Walaupun dapat berinteraksi dan saling membelajarkan antarwarga negara satu dengan negara lain tetapi masing-masing mempertahankan identitas masing-masing, bahkan menjaga, menyuburkan identitas keanekaragaman budaya. Jangan sampai terjadinya peleburan identitas, dan hilangnya karakteristik budaya, gaya, cara hidup. Inilah yang menjadi persoalan pokok bagaimanakah pembelajaran atau pembekalan warga negara agar dia memiliki karakter yang khas memiliki harga diri dan responsibel dan partisipatif dalam dunia semakin sempit/datar.

Tantangan globalisasi menjadikan pendidikan sebagai bagian penting untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam pembinaan karakter bangsa terutama menghadapi tantangan zaman dan arus neoliberalisme dunia, agar mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas memiliki daya saing secara bermartabat di dunia internasional. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimanakah sistem pendidikan dapat membangun karakter bangsa yang lebih maju dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dahulu maju pesat dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Engkoswara (1999) kehidupan manusia Indonesia menjelang tahun 2020 akan semakin membaik dan dinamik. Untuk itu kualitas lulusan dituntut memiliki kemampuan kemandirian yang tangguh agar dapat menghadapi tantangan, ancaman, hambatan yang diakibatkan terjadinya perubahan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tantangan yang terjadi pada era global adalah semakin menipisnya kualitas kemandirian manusia Indonesia. Krisis yang melanda Indonesia yang multidimensi mengakibatkan budaya bangsa semakin memudar, yaitu terjadinya degradasi moral spiritual, semangat berusaha dan bekerja yang semakin melemah, kreativitas yang semakin mengerdil dan menjurus ke arah negatif. Melalui pengembangan individu diharapkan secara keseluruhan masyarakat akan mengalami "*self empowering*" untuk lebih kreatif dan inovatif. Kecenderungan terjadinya perubahan tidak dapat dihindari semua pihak, baik individu, kelompok masyarakat, bangsa, maupun Negara, sehingga dituntut untuk

Muhammad Anwar Rube'I, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lebih memfokuskan diri pada penyusunan rencana strategik dengan visi yang jauh ke depan agar siap menghadapi setiap perubahan. Realita yang ada, banyak lulusan pendidikan yang tidak mampu mengisi lowongan pekerjaan karena ketidakcocokan antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja. Disamping itu penyerapan tenaga kerja oleh instansi pemerintah maupun swasta sangat terbatas, akan memberi dampak jumlah tingkat pengangguran akan meningkat pada setiap tahunnya.

Berdasarkan pendapat Engkoswara di atas dapat dikatakan bahwa generasi muda sangat penting mempunyai karakter yang mandiri. Generasi muda yang mandiri merupakan cerminan kualitas yang dimilikinya, karena dengan kemandirian manusia akan memiliki karakter yang tidak mudah menyerah dan akan selalu konsisten terhadap segala keputusan yang telah diambil. Sejalan dengan hal ini Sumahamijaya (2003: 9) menyatakan bahwa:

Ciri-ciri sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul adalah berkarakter mandiri, berwatak kerja keras, tekun belajar dan menghargai waktu, pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, selalu proaktif dalam mencari dan menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. menghadapi masa depan yang penuh dengan persaingan sangatlah diperlukan SDM yang berkualitas unggul supaya dapat bertahan dan bersaing di masa mendatang.

Pemikiran tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa untuk menghadapi kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang dan demi terbentuknya generasi yang mampu berdaya bersaing dalam era globalisasi ini, maka dibutuhkan generasi yang berkarakter mandiri, kreatif, bertanggung jawab, berani melakukan perubahan, proaktif, selalu memiliki solusi dalam mengentaskan semua permasalahan yang dihadapinya baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Secara historis salah satu kegagalan bangsa Indonesia dalam menghasilkan mutu lulusan yang produktif, merupakan dampak dari sistem pendidikan yang diterapkan pada masa orde baru. Hal mana dijelaskan Todaro (2003:7) bahwa pelembagaan nilai-nilai kebangsaan dapat memupuk nilai kebanggaan, kegigihan, kejujuran, patriotisme sangat populer ketika zaman orde baru dan banyak

Muhammad Anwar Rube'I, 2014

*INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membuahkan hasil walaupun pada akhirnya pendidikan yang bersifat indoktrinatif dana refresif dalam pendekatannya membuat rakyat Indonesia tidak berdaya, kurang kreatif, kurang gigih dan militan dalam bekerja, senang berfikir instan dan lebih senang bekerja daripada berusaha sendiri sehingga pembinaan karakter bagi masyarakat pada masih terus dikembangkan sampai pada masa reformasi seperti sekarang ini.

Berkaitan dengan pembangunan pendidikan nasional, maka prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007) antara lain adalah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk membentuk dan membangun manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditunjukkan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.

Pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga akan menjadi bangsa yang beradab dan dapat bersaing di dunia internasional. Berkaitan dengan cita-cita pendidikan nasional telah dijelaskan

Muhammad Anwar Rube’l, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Berdasarkan tujuan nasional tersebut maka seluruh jalur jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia harus memiliki konsekuensi yang sama yaitu bermuara kepada tujuan nasional yang dapat mengembangkan sumber daya manusia secara terarah, terpadu, menyeluruh dengan melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen yang ada secara optimal sesuai dengan potensinya dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Sistem pendidikan di Indonesia harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Kemudian apabila kita melihat arah dari tujuan nasional pendidikan itu sudah jelas bahwa perlunya mengembangkan suatu misi yang teramat penting yaitu membentuk manusia seutuhnya yang memiliki semangat kebangsaan cinta tanah air dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita itu maka usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan harus semakin ditingkatkan, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kemandirian peserta didik melalui pengembangan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan tentunya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas secara pengetahuan, moral, dan mandiri. Belajar dan mengajar merupakan isi pokok pendidikan, oleh karena itu semua komponen yang ada dalam pendidikan harus diabdikan demi terciptanya proses belajar yang baik pada siswa.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah apakah pendidikan di masing-masing satuan pendidikan telah dilaksanakan dengan baik, dan mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan untuk melihat mutu penyelenggaraan pendidikan

dapat dilihat dari beberapa indikator. Beberapa indikator mutu hasil pendidikan yang selama ini digunakan di Negara kita adalah nilai ujian nasional (UN), persentase kelulusan, angka *dropout* (DO), angka mengulang kelas, persentase lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Indikator-indikator tersebut cenderung bernuansa kuantitatif, mudah pengukurannya, dan bersifat universal serta mematikan kemampuan kreativitas peserta didik. Di samping indikator kuantitatif, indikator mutu hasil pendidikan lainnya yang sangat penting untuk dicapai adalah indikator kualitatif yang meliputi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Indikator kualitatif tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik dan berkaitan dengan pembentukan sikap serta ketrampilan/*skill* berwirausaha peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, memiliki sikap dan ketrampilan/*skill* berwirausaha (Puskur Kemendiknas: 2010:1).

Berdasarkan Penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000), ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan mata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh *hard skill* dan sisanya 80% oleh *soft skill*. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan *soft skill* dari pada *hard skill*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan perlu juga membangkitkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan mutu pembelajaran dan factor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pembelajaran kita selama ini berjalan dengan verbalistik dan berorientasi semata-mata kepada penguasaan isi dari mata pelajaran. Pengamatan terhadap praktek pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa pembelajaran difokuskan agar siswa menguasai informasi yang terkandung dalam materi pelajaran dan kemudian dievaluasi seberapa jauh penguasaan itu dicapai oleh siswa. Seakan-

Muhammad Anwar Rube'I, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akan pembelajaran bertujuan untuk menguasai isi dari mata pelajaran tersebut. Bagaimana keterkaitan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana materi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan problema kehidupan, kurang mendapat perhatian. Pembelajaran seakan terlepas dari kehidupan sehari-hari, oleh karena itu siswa tidak mengetahui manfaat apa yang dipelajari, seringkali tidak tahu bagaimana menggunakan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan siswa.

Bertolak dari masalah tersebut, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah agar pendidikan dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, yaitu kemampuan dan keberanian menghadapi problema kehidupan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Pendidikan yang dapat mensinergikan berbagai mata pelajaran, mata diklat, mata kuliah menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apapun profesinya. Dengan bekal kecakapan hidup yang baik, diharapkan para lulusan akan mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya. Dan juga dapat "...mendorong keterbukaan intelektual, ..." (Jawwad, 2004: 48).

Pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki peran yang sangat dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan (*output*) pendidikan. Dan hal ini pun sangat tergantung pada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muchith di bawah ini:

Artinya pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan guru dalam melaksanakan atau mengemas proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan secara baik dan tepat akan memberikan kontribusi sangat dominan bagi siswa, sebaliknya pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik akan menyebabkan potensi siswa sulit dikembangkan atau diberdayakan. (Muchith, 2008: 1)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa, posisi guru memegang peranan penting untuk mengolah isi materi yang akan disampaikan

kepada siswa di kelas. Semakin berkualitas baik itu dari segi isi materi dan strategi yang digunakan oleh guru, maka akan semakin baik hasilnya bagi siswa.

Senada dengan pendapat di atas, Banks (1997: 99) mengemukakan bahwa:

*“Teachers, as well as other educators and leaders, must play an important role in educating students from diverse groups to become effective citizens in a democratic society. To become thoughtful and active citizens, students must experience democracy in classrooms and in schools. Action speaks much more cogently than words. Consequently, how teachers respond to marginalized students in classroom will to a great extent determine wheter they will experience democracy or oppression in classrooms and schools”.*

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa guru sebagai pendidik dan pemimpin di kelas, hendaknya mampu memegang peranan penting dalam memberikan pengajaran kepada siswa walaupun mereka datang dari latar belakang yang berbeda untuk menjadikan mereka sebagai warga negara yang baik dan cerdas dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, dan untuk menjadikan mereka sebagai siswa yang dapat berperan serta serta memiliki pemikiran yang baik.

Berbicara mengenai pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan pribadi yang mempunyai pola pikir untuk melakukan perubahan dan menciptakan peluang usaha. maka dalam Perpres No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disebutkan bahwa substansi inti program aksi bidang pendidikan di antaranya adalah penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia dengan memasukkan pula pendidikan kewirausahaan sehingga sekolah dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia.

Dalam rangka pembangunan insan cerdas komprehensif dan seutuhnya sebagaimana yang ditegaskan dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, bahwa yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah “insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis”. Namun demikian, kenyataan di



lapangan menunjukkan bahwa system pembelajaran saat ini belum sepenuhnya secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa termasuk karakter wirausaha. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan jumlah pengangguran yang relatif tinggi, jumlah wirausaha yang masih relatif sedikit, dan terjadinya degradasi moral. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini terutama masalah yang terkait dengan kewirausahaan antara lain dapat dilakukan dengan cara: (a) menanamkan pendidikan kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstrakurikuler, dan kegiatan pengembangan diri, (b) mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan pemahaman tentang kewirausahaan, menumbuhkan karakter dan keterampilan berwirausaha, dan (c) menumbuhkan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal di bawah Departemen Pendidikan nasional, mempunyai tujuan antara lain adalah menghasilkan manusia yang berpengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki guna menyongsong masa depan yang lebih baik. Kemudian setelah tamat bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi memasuki lapangan kerja secara mandiri sebagai wirausaha (*entrepreneur*). Saat ini lembaga pendidikan formal yang ada disemua tingkatan sekolah, baik sekolah negeri atau sekolah swasta, telah menempatkan materi pelajaran mulok (Muatan lokal) ke dalam materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Materi mulok yang dikembangkan di sekolah sangat bervariasi jenisnya tergantung kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi sekolah dimana sekolah tersebut berada. Hal ini juga didasarkan pada tuntutan dari KTSP, bahwa mulok dapat dikembangkan melalui mata pelajaran tersendiri maupun yang diintegrasikan pada mata pelajaran lain yang sesuai.

Sekolah sebagai tempat berinteraksi antarsesama peserta didik dipastikan melibatkan beragam nilai kehidupan yang lahir secara pribadi dengan berbagai penampilan dalam bentuk pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sekolah mempunyai peran yang besar dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik. Pendidikan nilai tidak sekedar program khusus yang diajarkan melalui mata pelajaran, tetapi mencakup keseluruhan proses pendidikan. Dalam hal ini,

Muhammad Anwar Rube'I, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan nilai berusaha membantu peserta didik untuk menyadari, mengalami nilai-nilai yang berlaku dan diterima secara universal.

Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri anak mencakup nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Misalnya adalah nilai-nilai kesopanan, toleransi, kehormatan, kejujuran, bertanggung jawab, bekerjasama, beribadah, dan lain sebagainya, perlu mendapatkan perhatian secara khusus di sekolah dasar. Bagaimana sekolah itu mampu untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Ironisnya adalah muatan pendidikan nilai mulai pudar dalam proses pendidikan. Pendidikan hanya sebatas mentransfer *knowledge* saja, sehingga yang terjadi adalah pendidikan hanya sebatas mencetak angka-angka saja. Tidak membekali dan menanamkan nilai-nilai yang sangat penting untuk keberlangsungan peserta didik di masa yang akan datang.

Berdasarkan pengamatan dan hasil kajian saat ini, nilai-nilai kewirausahaan masih jarang diberikan pada materi pelajaran di sekolah, dan masih sangat minim sekali dibahas pada materi pelajaran. Selama ini pembelajaran di sekolah sangat kering dengan nilai-nilai kewirausahaan, maka tidak sedikit anak kurang memahami makna sebuah nilai (filosofi) dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai-nilai kewirausahaan ini apabila di gali dan dikembangkan dalam pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kreatifitas diri siswa sehingga, siswa akan lebih memaknai dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian maka salah satu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai kewirausahaan adalah melalui pembelajaran dan pendidikan di sekolah.

Minimnya pembelajaran untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan tersebut maka lebih jauh nilai-nilai kewirausahaan perlu diajarkan dan ditransformasikan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan karakter. Agar pengetahuan mengenai nilai-nilai kewirausahaan ini dapat dipahami oleh para siswa maka pengertian dari nilai-nilai terlebih dahulu perlu diungkapkan untuk mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kewirausahaan. Berkaitan dengan apa itu nilai, Suryana (2006:37) menegaskan, dan mengolongkan pengertian dari nilai itu sendiri adalah:

Muhammad Anwar Rube'I, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Terdapat dua kelompok nilai, yaitu: 1) sistem nilai pribadi, 2) sistem nilai kelompok atau organisasi. Dalam sistem nilai pribadi terdapat empat jenis sistem nilai, yaitu: (1) nilai primer pragmatik, (2) nilai primer moralistik, (3) nilai primer afektif, dan (4) nilai bauran. Dalam sistem nilai primer pragmatik terkandung beberapa unsur, di antaranya perencanaan, prestasi, produktivitas, kemampuan, kecakapan, kreativitas, kerja sama, dan kesempatan. Sedangkan dalam nilai moralistik terkandung unsur-unsur keyakinan, jaminan, martabat pribadi, kehormatan, dan ketaatan”.

Secara khusus dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah adalah nilai-nilai kewirausahaan yang pragmatik dan mudah untuk dipahami. Dalam sistem nilai primer pragmatik terkandung beberapa unsur, di antaranya perencanaan, prestasi, produktivitas, kemampuan, kecakapan, kreativitas, kerja sama, dan kesempatan. Sedangkan dalam nilai moralistik terkandung unsur-unsur keyakinan, jaminan, martabat pribadi, kehormatan, dan ketaatan. Dalam kewirausahaan, sistem nilai primer pragmatik tersebut dapat dilihat dari watak, jiwa, dan perilaku, misalnya selalu bekerja keras, tegas, mengutamakan prestasi, keberanian mengambil risiko, produktivitas, kreativitas, inovatif, kualitas kerja, komitmen, dan kemampuan mencari peluang. Selanjutnya, nilai moralistik meliputi keyakinan atau kepercayaan diri, kehormatan, kepercayaan, kerja sama, kejujuran, keteladanan, dan keutamaan.

*Entrepreneurship* yang dijadikan sebagai salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam Standar Kompetensi Lulusan, telah teruji mengandung nilai-nilai kebaikan yang sepatutnya dimiliki peserta didik. Nilai-nilai kebaikan yang terkandung yaitu mempunyai visi dan misi, kreatif dan inovatif, berani menanggung resiko, berjiwa kompetisi, mampu melihat dan menciptakan peluang, cepat tanggap dan gerak cepat, berjiwa sosial dan menjadi dermawan (Gina, 2009: 5).

Berbicara tentang nilai-nilai kewirausahaan maka, menurut para ahli kewirausahaan, ada banyak nilai-nilai kewirausahaan yang dianggap paling pokok dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sebanyak 17 (tujuh belas) nilai yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik dan warga sekolah yang lain. Implementasi dari nilai-nilai pokok kewirausahaan tersebut tidak secara langsung dilaksanakan sekaligus oleh satuan pendidikan, namun dilakukan secara bertahap.

Muhammad Anwar Rube’l, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hal ini bukan berarti membatasi penanaman nilai-nilai (internalisasi) kewirausahaan tersebut kepada semua sekolah secara seragam, namun setiap jenjang satuan pendidikan dapat menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan yang lain secara mandiri sesuai dengan keperluan. Implementasi nilai-nilai kewirausahaan yaitu: (1) mandiri, (2) kreatif, (3) berani mengambil resiko dengan pertimbangan, (4) berorientasi pada tindakan, (5) kepemimpinan, (6) kerja keras, (7) Jujur, (8) Disiplin, (9) Inovatif, (10) Tanggung-jawab, (11) Kerja sama, (12) Pantang menyerah (ulet), (13) Komitmen, (14) Realistis, (15) Rasa ingin tahu, (16) Komunikatif, (17) Motivasi kuat untuk sukses. (Kemendiknas: 2010:10).

Jiwa entrepreneur sebenarnya dimiliki oleh setiap peserta didik, tetapi dalam jumlah dan kadar yang berbeda-beda. Oleh karena itu aspek tersebut harus diasah dan dipraktikkan sehingga dapat dikembangkan menjadi karakter. Pada dasarnya jiwa *entrepreneur* ini bukan sekedar pengetahuan teknik atau keterampilan, tetapi lebih berorientasi pada sikap mental melalui proses diri dengan praktik dan pengalaman karena dorongan motivasi dari diri sendiri. Oleh karena itu guru sangat berperan penting dalam menanamkan sikap mental peserta didik ini melalui proses pembelajaran. Untuk mengimplementasikan aspek tersebut, guru harus memahami betul, sehingga ketika penyampaian materi akan terintegrasikan dalam proses pembelajaran. Materi tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang “murni” namun merupakan terapan yang nantinya bisa direalisasikan oleh peserta didik. Dengan bekal sikap mental itulah diharapkan muncul gagasan, ide, dan pemikiran peserta didik dalam menghadapi kehidupannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di jelaskan di atas, bahwa dapat dikatakan bahwa perlunya integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam satuan mata pelajaran khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis nilai/karakter. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek.

- a. Pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran
- b. Pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstra kurikuler
- c. Pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri

- d. Perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik
- e. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan/Buku ajar
- f. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kutur sekolah
- g. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal  
(Puskur Kemendiknas, 2010 :58)

Integrasi pendidikan kewirausahaan yang dilakukan saat ini merupakan momentum untuk revitalisasi kebijakan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, mengingat jumlah terbesar pengangguran terbuka dari tamatan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal yang tidak bisa dilupakan dan dirasakan sangat penting dalam konteks pendidikan yang berwawasan kewirausahaan di sekolah yaitu bahwa Kementerian Pendidikan Nasional juga perlu membuat kerangka pengembangan kewirausahaan yang ditujukan bagi kalangan pendidik dan kepala sekolah. Mereka adalah agen perubahan ditingkat sekolah yang diharapkan mampu menanamkan karakter dan perilaku wirausaha bagi jajarannya dan peserta didiknya. Pendidikan yang berwawasan kewirausahaan ditandai dengan proses pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (*life skill*) pada peserta didiknya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di sekolah.

Untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada peserta didik ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: (1) pembenahan dalam kurikulum; (2) peningkatan peran sekolah dalam mempersiapkan wirausaha; (3) pembenahan dalam pengorganisasian proses pembelajaran; (4) pembenahan pada diri guru. Keberhasilan program pendidikan kewirausahaan dapat diketahui melalui pencapaian criteria oleh peserta didik, guru, dan kepala sekolah yang antara lain meliputi: (1) peserta didik memiliki karakter dan perilaku wirausaha yang tinggi, (2) lingkungan kelas yang mampu mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai kewirausahaan yang diinternalisasikan, (3) lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang bernuansa kewirausahaan (Mulyani, 2011:7).

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Konfigurasi atau

Muhammad Anwar Rube'i, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kerangka sistemik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut. *Pertama*, PPKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi. *Kedua*, PPKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PPKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah, 2007:86).

Jika memperhatikan uraian tersebut, maka tampak bahwa PPKn merupakan program pendidikan yang sangat penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa. Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan karakter, PPKn perlu memperkuat posisinya menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*valuebased*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Melalui pengalaman belajar semacam itulah para siswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif.

Muhammad Anwar Rube’l, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada dasarnya keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warganegara dewasa. Anak adalah warganegara hipotetik, yakni warganegara yang “belum jadi” karena masih harus dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya (Budimansyah, 2007:11). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganegara untuk menyokong kehidupan demokrasi konstitusional.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Secara konseptual dan epistemologis, pendidikan kewarganegaraan memiliki misi menumbuhkan potensi individu agar memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai warga negara yang berwatak dan berperadaban baik. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wujud dari pendidikan karakter yang mengajarkan etika personal dan nilai-nilai kebajikan Best (Winataputra, 2007).

Secara praktis dan teoritis pendidikan kewarganegaraan di sekolah merupakan sarana membentuk karakter siswa sesuai dengan konteks kehidupan di sekolah. pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Senada dengan pendapat Somantri (2001:287) bahwa “untuk program PKn mungkin akan banyak muncul *“persuasive generalization”* dalam arti menumbuhkan tanggung jawab setiap warga Negara dalam mencari dan memperoleh tingkat hidup lebih baik, yaitu: (a) mempersiapkan diri dalam lapangan kerja yang diperolehnya; (b) mempersiapkan dan melatih diri dalam

Muhammad Anwar Rube’l, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hubungan social dan perubahan social yang harmonis; (c) mempersiapkan dan melatih diri sebagai warga negara yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab dalam hubungan dengan syarat-syarat objektif yang sudah menjadi ketetapan-ketetapan Negara.

Oleh karena itu pembinaan dan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk merubah sikap dan mental siswa kearah yang lebih baik. Sebagaimana terdapat dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yaitu untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Hal ini menunjukkan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan di sekolah sangat penting dalam membentuk karakter siswa melalui pembinaan nilai-nilai yang dilakukan, baik dalam proses pembelajaran maupun proses pembiasaan yang terjadi di lingkungan sekolah secara keseluruhan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter merupakan sistem penanaman nilai-nilai yang baik dan benar pada siswa di sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Salah satu unsur penting dalam pendidikan karakter adalah mengajarkan nilai-nilai agar peserta didik memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai dasar sebagai acuan dalam berperilaku. Pemahaman tersebut mestinya menjadi bagian dari pemahaman pendidikan karakter, hal tersebut disebabkan karena peserta didik lebih banyak belajar dari pemahaman dan pengertian tentang nilai-nilai yang dipahami oleh orang dewasa atau guru (Koesoema, A., 2007: 213). Selanjutnya salah satu tugas penting dari pendidikan adalah membangun karakter anak didik. Karakter merupakan standar batin yang terimplementasikan dalam berbagai bentuk kualitas diri, sehingga karakter diri dilandasi nilai serta cara berpikir berdasarkan nilai tersebut dapat terwujud dalam perilaku (Budimansyah, 2010:116).

Apabila pendidikan nilai/karakter sebagai basis Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan secara terus menerus baik melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal maka akan mampu menumbuhkembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan. Suksesnya dalam pembentukan karakter

Muhammad Anwar Rube'I, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



peserta didik akan sangat berperan dalam pembentukan jiwa kewirausahaan. Dalam upaya pengembangan pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai/karakter pada dasarnya sejalan dengan pengembangan semangat atau jiwa kewirausahaan. Melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, upaya mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nilai/karakter dianggap penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh, sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian ilmiah tentang integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *Economic Civic*. Penelitian Studi Kasus ini akan dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; mudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa.
2. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.
3. Masih banyak guru belum terlatih secara baik dalam melaksanakan belajar aktif dan membentuk karakter. Peran guru dalam mengembangkan karakter adalah kemampuan menterjemahkan misi dan program pembinaan karakter/moral, nilai kedalam program pembelajaran yang menarik di

Muhammad Anwar Rube'I, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK ECONOMIC CIVIC (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sekolah. Bukan berorientasi pada hasil belajar siswa semata tetapi lebih para proses pembelajaran; Proses pembiasaan nilai-nilai kejujuran, toleransi, keberanian dalam interaksi antara siswa dan guru, antara siswa dan siswa, di sekolah, rumah dan lingkungan belajar siswa.

4. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang secara langsung (*eksplisit*) mengenalkan nilai dan moral, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai.
5. Pendidikan kewarganegaraan menerima sumber-sumber pengetahuan lainnya untuk memperkayanya. Sehingga perlunya proses pengintegrasian unsur-unsur dari pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan.
6. Perlunya pengembangan pendidikan kewarganegaraan baik dari segi bahan atau materi PKn maupun dari segi penggunaan metode mengajarnya. pendidikan kewarganegaraan menghendaki pelajaran yang mempunyai arti bagi para siswa dalam menanggapi masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Menurut Somantri (2001:158-159) mengatakan bahwa “untuk pengembangan PKn kita harus secara integrative memperhatikan unsur-unsur yaitu: a) hubungan pengetahuan intraseptif (*intraseptive knowledge*) dengan pengetahuan ekstraseptif (*extraseptive knowledge*) atau antara agama dan ilmu, b) kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional, c) disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendidikan, d) disiplin ilmu-ilmu social, khususnya “ide fundamental” ilmu Kewarganegaraan, e) dokumen Negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 dan perundangan Negara, serta serta sejarah perjuangan bangsa, f) kegiatan dasar manusia, g) pengertian Pendidikan IPS.
7. Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengarah pada internalisasi nilai-nilai di dalam tingkah laku sehari-hari melalui proses pembelajaran dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Namun pada umumnya belum secara memadai mendorong terinternalisasinya nilai-nilai oleh masing-masing siswa.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana terintegrasinya nilai-nilai kewirausahaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *Economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”. Agar lebih terarah, maka fokus masalah di atas dirinci dalam beberapa sub-sub masalah yang sekaligus, menjadi pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kewirausahaan apa saja yang ditanamkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?
2. Bagaimana implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada saat mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?
4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam proses Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif tentang:

1. Nilai-nilai kewirausahaan apa saja yang ditanamkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Muhammad Anwar Rube’l, 2014

**INTEGRASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK *ECONOMIC CIVIC* (EKONOMI WARGANEGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagaimana implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada saat mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam proses Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam proses Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *economic civic* di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menggali dan mengkaji tentang integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk *Economic civic* siswa di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

##### **2. Praktis**

Secara praktis manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi siswa : memahami konsep nilai-nilai kewirausahaan dan memberikan pembelajaran dan pengalaman nyata tentang kegiatan wirausaha, sehingga terbentuknya sikap atau karakter wirausaha.
- b. Bagi guru: penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengembangkan model pembelajaran PKn berbasis nilai/karakter yang mampu membentuk karakter atau sikap wirausaha siswa.
- c. Bagi Sekolah: diharapkan akan memberikan sumbangan konsepsi dan kerangka praksis-kurikuler dan sosio kultural pembelajaran karakter dalam konteks *school-based democratic education* untuk membudayakan nilai-nilai kewirausahaan dan nilai-nilai karakter.

## E. Struktur Organisasi Penulisan

Tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni: bab I tentang pendahuluan, bab II tentang kajian pustaka, bab III tentang metode penelitian, bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan serta bab V tentang kesimpulan dan rekomendasi. Untuk lebih jelasnya, pembahasan dari kelima bab ini secara singkat diuraikan dibawah ini.

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II tentang kajian pustaka. Pada bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: Pendidikan Kewarganegaraan, internalisasi nilai kewirausahaan, nilai-nilai kewirausahaan, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan, integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam mata pelajaran PKn dan pembentukan *economi civic*, hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, prosedur penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu: kesimpulan, dan rekomendasi.